

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2016. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Anggraeni, S.E. 2019. Implementasi Program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan Maju Mapan, RPH Sumberagung, BKPH Sumbermanjing, KPH Malang. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Aristo, W.H. 2008. Evaluasi Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada KTHKm Sedyo Rukun Desa Banyusoco, Playen, Kabupaten Gunungkidul. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik DIY. 2019. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2017. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2021. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Playen Dalam Angka Tahun 2020. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Semanu Dalam Angka Tahun 2020. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Effendi, S. and Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Dewi, I.N. 2018. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. Buletin Eboni, 15(2), pp.65-77.
- Purnomo, H. 2019. Dinamika Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Studi tentang Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta). Tesis. Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. 2017. Modul Pelatihan Pemantauan SVLK Edisi Oktober 2017. Jakarta: UKAID
- Javlec Indonesia. 2012. Peringatan 5 Tahun IUPHKM. Javlec Press, Yogyakarta. <http://javlec.org/peringatan-5-tahun-iuphkm/> (diakses Februari 2021).

- Javlec Indonesia. 2012. Kendala Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Yogyakarta. Javlec Press, Yogyakarta. <http://javlec.org/kendala-pengelolaan-hutan-kemasyarakatan-hkm-di-yogyakarta/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2016. Javlec Indonesia, Dampingi Penyusunan Revisi Rku Pemegang Ijin Hkm Di Gunung Kidul. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/javlec-indonesia-dampingi-penyusunan-revisi-rku-pemegang-ijin-hkm-di-gunung-kidul/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2018. Sarasehan 11 Tahun Izin Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/sarasehan-11-tahun-izin-hutan-kemasyarakatan-hkm/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2019. Tebang Wiwitan HKM. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/tebang-wiwitan-hkm/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2019. Hkm Tani Manunggal Bleberan Lakukan Penjarangan Pohon. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/hkm-tani-manunggal-bleberan-lakukan-penjarangan-pohon/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2019. Tradisi Wiwitan pada Kegiatan Pemanenan Kayu Jati Hkm Sedyo Rukun Banyusoco. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/tradisi-wiwitan-pada-kegiatan-pemanenan-kayu-jati-hkm-sedyo-rukun-banyusoco/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2020. Pemanenan Kayu Perhutanan Sosial:Pembuktian dari Yogyakarta Untuk Indonesia. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/pemanenan-kayu-perhutanan-sosial-pembuktian-dariyogyakarta-untuk-indonesia/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2020. Kelompok Tani Belajar Secara Online, Sistem Informasi PUHH. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/kelompok-tani-belajar-secara-online-sistem-informasi-puhh/> (diakses Februari 2021).
- Javlec Indonesia. 2020. Petani HutSos Gunungkidul Bersiap Memanen Kayu. Javlec Press, Yogyakarta. <https://javlec.org/petani-hutsos-gunungkidul-bersiap-memanen-kayu/> (diakses Februari 2021).
- Komarudin. 2017. SIPUHH Menuju Inovasi Berskala Internasional. Buletin PHPL. Edisi IV. <http://release.phpl.menlhk.go.id/file/buletin/1518658566Buletin%20PHPL%20Edisi%20IV.pdf> (diakses Mei 2020).
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 208/KPTS/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani, Sedyo Rukun, Padukuhan Gembol, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 214/KPTS/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Kelompok Tani, Sedyo Makmur, Padukuhan Jragum, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/KPTS-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/KPTS-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/KPTS-II/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/KPTS-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31/KPTS-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 438/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 745/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi Kepada Koperasi Petani HKm Sedyo Makmur seluas  $\pm 115$  ha di Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 746/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan pada Hutan Produksi Kepada Koperasi Tani Manunggal dengan total luas  $84,65 \text{ ha} \pm 115 \text{ ha}$  di Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY.

Kuncoro, M. and Cahyani, D.F., 2018. Performance of social forestry on farmers' revenues: lessons from Yogyakarta and Lampung, Indonesia. *The Business & Management Review*, 9(4), pp.275-289.

Makinde, T. 2005. Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. *Journal of Disability Development and Education*. 52 (1): 59-68.

Mulyadin, R.M., Surati, S. and Ariawan, K., 2016. Kajian Hutan Kemasyarakatan sebagai Sumber Pendapatan: Kasus di Kab. Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1), pp.13-23. Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Rangkuti, F. 2014. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, F. 2018. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia. Jakarta.

- Rencana Pengelolaan KPH Yogyakarta Jangka Tahun 2014-2023. Yogyakarta: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suradiredja, D., Edo, R.H., Markum., Andi, P. and Wiji, J.S., 2017. Catatan Sejarah Yang Dilupakan. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jakarta.
- Soenarno. 2018. Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu pada Pemanenan Kayu Hutan Alam. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Vol. 36 No 1. Bogor.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Weaver, R.K. 2009. Target compliance: The final frontier of policy implementation. Governance Studies at Brookings.
- Yuwono, T. 2020. Terhambatnya Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Perhutanan Sosial D.I. Yogyakarta. Surat Terbuka Untuk Bapak Dirjen PSKL dan Dirjen PHPL KLHK Dualisme Tafsir SIPUHH. Yogyakarta.